HIZBUT TAHRIR: PEMIKIRAN DAN PERGERAKAN SOSIAL POLITIK DI INDONESIA

SKRIPSI

Disusun untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam



Disusun Oleh:

ABDUR ROUF (32501700001)

PROGRAM STUDI SEJARAH PERADABAN ISLAM

JURUSAN ADAB

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG

2021

Nama : Dr. Ahmad Mujib, S.Th.I., M.A.

Alamat : Genuksari

Lampiran : 2 (dua) Eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

NOTA PEMBIMBING

Kepada : Yth. Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang

Di-Semarang

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya bimbing dengan baik dan benar, maka naskah skripsi saudara

Nama : Abdur Rouf

NIM : 32501700001

Judul :Hizbut Tahrir: Pemikiran dan Pergerakan Sosial Politik di

Indonesia

Mohon untuk dimunaqosahkan

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Dosen Pembimbing

Dr. Ahmad Mujib, M.A



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455 email: informasi@unissula.ac.id web: www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

Nama

: ABDUR ROUF

Nomor Induk

: 32501700001 .

Judul Skripsi

: HIZBUT TAHRIR: PEMIKIRAN DAN PERGERAKAN SOSIAL POLITIK DI

INDONESIA

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi sejarah Peradaban Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Rabu, 03 Jumadil Awal 1443 H 08 Desember 2021 M

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Humaniora (S.Hum.)

Dewan Penguji

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

Mohammad Noviani Ardi, S.Fil.I, MIRKH

Penguji I

Penguji II

Dr. Agus Irfan, S.H.I., M.P.I.

Dr. Muna Yastuti Madrah, MA

Dr. M. Muhtar Arifin Sholeh, M.Lib.

MOTTO

"...Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada-Mu ya Tuhanku."

(Q.S Maryam [19]: 4)



DEKLARASI

Bismillahirrahmanirrahiim

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

- 1. Skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis orang lain atau diterbitkan, dan
- 2. Skripsi ini tidak berisi pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang penulis jadikan sebagai sumber referensi.

Semarang, 27 Desember 2021

Penulis

Abdur Rouf

NIM. 32501700001

KATA PENGANTAR

Assalamulaikum. Wr. Wb.

Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi sang pemilik alam semesta, sang raja dari segala raja, sang desainer ulung, yang mendirikan langittanpa tiang, menjadikan planet-planet beredar pada porosnya, memberi kehidupan kepada seluruh makhluknya, memberikan rahmat dan karunia-Nya. Sehingga atas dasar rahmat dan karunia-Nya itulah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan tepat waktu. Sholawat serta salam marilah kita kirimkan kepada baginda mulia rasulullah Muhammad saw, para sahabat dan keluarganya, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di hari akhir. *Aamiin*.

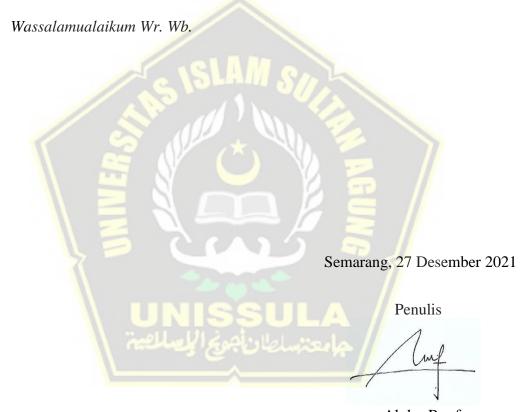
Tahapan penulisan skripsi ini dimulai dari persiapan dengan menganalisis permasalahan, mengajukan judul, dan bimbingan lalu melakukan revisi jika diperlukan. Sebagai manusia biasa, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang tak terhingga kepada berbagai pihak diantaranya:

- Rektor Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang, Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.H
- Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)
 Semarang, Bapak Drs. M. Muhtar Arifin S, M.Lib.
- 3. Ketua Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Bapak Dr. H. Kurdi Amin,

- M.Adan sekarang sudah digantikan oleh bapak Mohammad Noviani Ardi, S. Fil.I, MIRKH., yang memberikan banyak bimbingan dan motivasi selama masa kuliah.
- 4. Bapak Dr. Ahmad Mujib, S. Th.I., M.A. selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan ikhlas meluangkan waktu serta memberikan ilmunya dalam membimbing penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
- 5. Seluruh dosen program studi Sejarah Peradaban Islam Unissula yang telah banyak memberikan bekal ilmu pengetahuan dan tuntunan selama penulis menimba ilmu di program studi Sejarah Peradaban Islam Unissula Semarang.
- 6. Kepada kedua orangtua penulis, alm. Bapak Ibrahim dan Ibu Sholikah yang telah mendorong penulis untuk tetap semangat dalam menuntut ilmu dan selalumemberikan motivasi untuk memperkuat diri, memberikan do'a-do'a terbaiknyakepada penulis. Juga kepada saudara-sadara penulis, Kakak Ulin Nuha dan Ali Mahfud, serta adik Muhimmatus Saidahh. Sehingga penulis sangat bangga telah menyelesaikan gelas sarjana yang kedua kalinya ini.
- 7. Kepada Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA) penulis ucapkan banyak terimakasih atas kesempatan menerima beasiswa *double degree* yang luar biasa ini. Sungguh ini adalah sebuah kehormatan dan kebanggan bagi penulis. Juga kepada seluruh pegawai YBWSA saya ucapkan terimakasih atas dukungan dan diberikannya kesempatan bagi penulis untuk membuat skripsi ini.

8. Seluruh teman-teman *double degree* SPI angkatan 8, penulis mengucapkan banyak terimakasih atas kebersamaannya selama kurang lebih 4 tahun ini.

Sebagai manusia yang *doif* penulis menyadari masih banyak kekurang dan kelemahan dalam penulisan ini. Maka kritikan dan saran sangat diharapkan oleh penulis untuk menyempurnakan penulisan ini. Harapan penulis semoga penelitian ini bermanfaat untuk para pembaca dan masyarakat yang cinta akan ilmu pengetahuan, Terima kasih.



Abdur Rouf NIM. 32501700001

ABSTRAK

Abstract: One mass organization that is currently in the middle of a conversation is Hizb ut-Tahrir. This organization has been revoked of its rights and authority as a mass organizationin Indonesia. The disbanding of HTI by the government is suspected because the concept developed by HTI isconsidered to have been at odds with Pancasila as the basis of the Republic of Indonesia. In this study the author will examine how the dissolution of Hizb ut-Tahrir Indonesia is reviewed in a socio-political perspective. This research uses descriptive analysis method. Based on hybridity theoryand alienation theory. The concept of Hizb ut-Tahrir inIndonesia is different from its birthplace in the Middle East, the Hizb ut-Tahrir in Indonesia is more focused on Islamic Shari'a, which is less understood by some Muslims in Indonesia and the dissolution of Hizb ut-Tahrir in Indonesia due to the isolation of this organization from the government.

Abstrak: Salah satu organisasi massa yang saat ini tengah menjadi perbincangan yakni Hizbut Tahrir. Organisasi ini telah dicabut hak dan kewenangannya sebagai organisasi masa di Indonesia. Pembubaran HTI oleh pemerintah ini ditengarai karena konsep yang dikembangkan HTI dianggap telah berseberangan dengan pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia. Dalam penelitian ini penulis akan menelaah bagaimana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia ditinjau dalam perspektif sosial politik. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis.

DAFTAR ISI

NO	TA PEMBIMBING	i
LE	MBAR PENGESAHAN	ii
MC	OTTO	iii
DE	KLARASI	iv
KA	TA PENGANTAR	v
AB	STRAK	viii
DA	FTAR ISI	ix
BA	В I	1
PE	NDAHULUAN	1
	Latar Belakang	
B.	Rumusan Masalah	4
C	Ratacan Macalah	Δ
D.	Tujuan Penelitian	4
E.	Manfaat Penelitian	5
F.	Penelitian Terdahulu	5
H.	Penelitian Terdahulu Sistematika Bahasan	7
BA	В II	9
	NDASAN TEORI	
A.	Teori Gerakan Sosial	9
B.	Teori Gerakan Politik	.11
C.	Teori Perubahan Sistem Politik	.12
D.	Hipotesa	. 13

BAB III	16
PEMIKIRAN DAN PERGERAKAN HIZBUT TAHRIR	16
A. Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir	16
B. Landasan dan Pemikiran Hizbut Tahrir	20
C. Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia	23
BAB IV	26
PARTISIPASI HIZBUT TAHRIR DALAM PERGERAKAN SOSIAL-POLITIK DI INDONESIA	
A. Hizbut Tahrir Sebagai Gerakan Sosial-Politik	26
B. Dinamika Hizbut Tahrir di Indonesia	28
C. Pengaruh Hizbut Tahrir di Indonesia	35
BAB V	43
PENUTUP	43
A. KESIMPULAN	43
B. SARAN	45
DAFTAR PUSTAKA	46

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Umat Islam terpecah belah menjadi beberapa negara sejak runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani pada tahun 1924. Banyak upaya dilakukan agar umat Islam bangkit kembali dari keterpurukannya. Salah satu upaya tersebut adalah dengan munculnya berbagai lembaga, gerakan, organisasi, yayasan dan partai Islam. Adapun gerakan-gerakan Islam tersebut di antaranya adalah Pan-Islamisme, Salafi Dakwah, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin dan lain sebagainya.

Hizbut Tahrir terkenal sebagai gerakan terdepan yang menyuarakan berdirinya Daulah Islamiyah di antara berbagai gerakan yang ada. Hizbut Tahrir dikenal sebagai gerakan yang paling yang paling santer dalam menggaungkan berdirinya Khilafah Islamiyyah. Menurutnya, syariat Islam tidak bisa diterapkan secara menyeluruh (kaffah) kecuali dengan diterapkannya sistem negara Khilafah.¹

Demi mencapai tujuan yang diinginkan, Hizbut Tahrir tak kenal lelah menyebarkan gagasan, ideologi dan pemikirannya tersebut ke seleuruh penjuru dunia, termasuk Indonesia. Terlebih, Indonesia merupakan negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Di mana hal tersebut dianggap sebagai suatu

¹ Zulfadli, "Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta". Tesis (Yogyakarta: Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga, 2010), h. vi

kelebihan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain.

Hizbut Tahrir didirikan oleh Taqiyyudin al-Nabhani tahun 1909-1977. Secara resmi kemudian dipublikasikan tahun 1953 di al-Quds, Yerussalam.² Taqiyyudin al-Nabhani merupakan seorang ulama besar dan berpengaruh di Palestina. Pernah menjadi Hakim Agung di Mahkamah Isti'naf, Al-Quds, Palestina. Kepemimpinan Taqiyuddin al-Nabhani berakhir pada 20 Juni 2977 saat beliau meninggal dunia. Sejak saat itu tampuk kepemimpinan Hizbut Tahrir berpindah kepada Abdul Qadim Zallum sampai tahun 2003. Secara Internasional, kepemimpinan Hizbut Tahrir sekarang diampu oleh Syaikh Atha' Abu Rastah. Berbagai upaya pengambil alihan kekuasan pernah dicoba oleh Hizbut Tahrir di beberapa negeri Timur Tengah, seperti tahun 1969 di Yordania, 1973 di Mesir, 1973 di Sudan, Tunisia, Irak, dan Al-Jazair. Semua upaya pengambil alihan tersebut berakhir dengan kegagalan.³

Sejak kejadian tersebut, Hizbut Tahrir mengubah strategi dakwah dan perjuangannya menjadi lebih halus, yakni dengan menyuguhkan gagasan, wacana dan pendidikan kepada masyarakat luas melalui dakwah. Hizbut Tahrir banyak melakukan kegiatan dakwah dengan mengenalkan kebudayaan Islam, menyerukan berdirinya Khilafah Islamiyah dan memberi pemahaman kepada masyarakat tentang akidah Islam yang benar. memahamkan masyarakat tentang aqidah Islamiyah yang benar. Fokus dakwah Hizbut Tahrir lebih berorientasi kepada aspek pemikiran dan memperkenalkan

² Ihsan Samarah. *Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani*. (Bogor: Al-Izzah Press. 2002). h. 4.

³ Endang Turmudzi dan Riza Sihabudin. *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. (Jakarta: LIPI Press. 2006). h. 265.

istilah perang pemikiran (*Ghazw al-Fikr*) sebagai upaya meluruskan ideologi-ideologi yang kontra dan tidak sesuai dengan syariat dan ajaran agama Islam.⁴

Hizbut Tahrir memiliki tujuan yang berupa terwujudnya Khilafah Islamiyah atau Daulah Islam. Model pemerintahan Khilafah Islamiyah adalah negara menerapkan syariat Islam secara total dan model pemerintahannya merujuk kepada pemerintahan masa Rasulullah SAW di Madinah yang kemudian dilanjutkan oleh para Sahabat.

Di Yordania, Suriah dan Libanon, Hizbut Tahrir termasuk dalam daftar organisasi yang dilarang pemerintah sebab dapat mengancam kesatuan negara mereka. Meskipun demikian Hizbut Tahrir berhasil menyusup ke dalam tentara, organisasi dan parlemen yang ada berkat ketekunan dan semangat para aktivisnya. Seperti halnya beberapa negara, Hizbut Tahrir juga mulai menyebarkan pengaruhnya ke Indonesia. Sebab Indonesia juga merupakan negara dengan populasi umat Muslim terbesar di dunia mengalahkan muslim yang ada di negara-negara Arab.⁵

Hizbut Tahrir mulai masuk ke Indonesia tahun 1980-an. Perkembangannya belum terlalu signifikan pada saat itu dikarenakan masa kepemimpinan Presiden Soeharto yang menekankan kepada Pancasila. Di era 1990-an Hizbut Tahrir mulai menyebarkan dakwahnya ke masyarakat dengan berdakwah di masjid, perguruan tinggi, perusahaan, sekolah, perkantoran, dan perumahan. Di Indonesia, Hizbut Tahrir disebut dengan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) yang mana organisasinya terdaftar

3

⁴ Hizbut Tahrir. *Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir*. (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah. 2000). h. 23.

⁵ Mujamil Qomar, *Fajar Baru Islam Indonesia?* (Bandung: Penerbit Mizan, 2012) h. 7.

secara resmi di Departemen Dalam Negeri no. 44/D.III.2/VI/2006.

Pengaruh dan gerakan yang makin meluas dari waktu ke waktu, tentu Hizbut Tahrir memberikan dampak kepada masyarakat di Indonesia. Apa saja dampak dari pemikiran dan pergerakan Hizbut Tahrir di Indonesia dan bagaimana pergerakan sosial politiknya? Dari uraian di atas, penulis ingin membahas lebih lanjut dengan penelitian yang berjudul "HIZBUT TAHRIR: PEMIKIRAN DAN PERGERAKAN SOSIAL POLITIK DI INDONESIA".

B. Rumusan Masalah

Dari deskripsi latar belakang serta gambaran permasalahan yang telah dipaparkan, maka permasalahan pokok yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana latar belakang masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia?
- b. Bagaimana perkembangan Hizbut Tahrir di Indonesia?
- c. Bagaimana pengaruh pemikiran dan pergerakan sosial politik Hizbut Tahrir di Indonesia?

C. Batasan Masalah

Dikarenakan pembahasan yang cukup luas, maka ada baiknya penelitian ini perlu diberi batasan. Oleh karena itu, peneliti hanya akan membahas tentang pergerakan dan pemikiran Hizbut Tahrir di Indonesia.

D. Tujuan Penelitian

Berdasar rumusan masalah yang ada, tujuan penelitian penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Mengetahui bagaimana latar belakang masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia?
- b. Mengetahui bagaimana perkembangan Hizbut Tahrir di Indonesia?
- c. Mengetahui bagaimana pengaruh pemikiran dan pergerakan sosial politik Hizbut Tahrir di Indonesia?

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan dan pengetahuan tentang pemikiran dan pergerakan politik Hizbut Tahrir di Indonesia.

- 2. Secara Praktis
- a. Akademik

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber referensi dan kajian pemikiran bagi Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang terutama jurusan Sejarah Peradaban Islam dan sebagai bahan bacaan serta sumber referensi bagi perpustakaan di Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

F. Penelitian Terdahulu

Banyak sumber referensi berupa buku dan skripsi yang membahas tentang Hizbut Tahrir, di antaranya adalah:

1. Penelitian sebelumnya ditulis oleh ditulis oleh Zulfadli tahun

2010 dengan judul "Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta". Penelitian ini membahas tentang infiltrasi gerakan Hizbut Tahrir Indonesia yang terdapat di Yogyakarta. Dinilai oleh peneliti bahwa dari berbagai gerakan yang ada di Yogyakarta, Hizbut Tahrir merupakan gerakan yang solid, rapi dan paling santer menyerukan didirikannya negara Khilafah Islamiyah. Penelitian ini hanya berfokus pada gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta.

Penelitian selanjutnya berupa skripsi dengan judul "Sistem 2. Khilafah dalam Pandangan Hizbut Tahrir" yang ditulis oleh Suwanto tahun 2009. Pembahasan yang terdapat di dalamnya membahas tentang khilafah sering disalahpahami oleh umunya masyarakat yang awam. Kesalahpahaman tersebut muncul karena adanya percampuran antara pemahaman sejaran khilafah dengan sistemnya. Sehingga banyak yang hanya menangkap sisi buruk fakta sejarah yang telah dilakukan oleh para khalifah yang ada. Dengan demikian, belum ada satupun peneliti yang khusus mengkaji tentang pemikiran dan pergerakan sosial politik Hizbut Tahrir di Indonesia.

G. Metode Penelitian

A. Jenis penelitian

Peneliti akan menggunakan menggunakan kajian pustaka (*library research* dalam skripsi ini dengan metode kajian mendalam, yakni berupa deskriptif analitis atau kualitatif.

B. Sumber Data

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber,

sebagai berikut:

a. Data primer terdiri dari buku-buku tentang Hizbut Tahrir seperti buku

"Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir", Buku

"Negara Islam Tinjauan Faktual Upaya Rasulullah SAW. Membangun

Daulah Islamiyah hingga Masa Keruntuhannya" (2000) karya Taqiyuddin al-

Nabhani, terjemah Umar Faruk, "Hizbut Tahrir Mengenal Sebuah Gerakan

Islam di Timur Tengah" (1985) karya Abdul Qadim Zallum, buku

"Pembentukan Partai Politik Islam" (2002) karya Taqiyuddin al-Nabhani.

b. Sedangkan untuk sumber data sekunder bersumber dari tulisan-tulisan,

publikasi ilmiah yang menyangkut dan membahas tentang Hizbut Tahrir,

terutama Hizbut Tahrir Indonesia.

H. Sistematika Bahasan

Penelitian ini akan ditulis dalam bentuk laporan yang tersusun atas beberapa bab

untuk mempermudah penyampaian dan pemaparan. Dalam setiap bab berisi tentang

pembahasan yang berbeda antara satu dan lainnya namun masih berkaitan. Berikut

rinciannya:

BAB I: PENDAHULUAN

7

Bab ini berisikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan

Masalah, Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu, Metode

Penelitian dan terkahir Sistematika Penulisan.

BAB II: LANDASAN TEORI

Bab ini akan dibahas tentang teori-teori yang akan digunakan dalam penelitian,

yang akan berisi Landasan Teori dan Hipotesis.

BAB III : PEMIKIRAN DAN PERGERAKAN HIZBUT TAHRIR

Dalam bab ini, peneliti akan memaparkan hal-hal yang lebih spesifik spesifik

tentang Hizbut Tahrir, seperti sejarah berdirinya Hizbut Tahrir, Ajaran dan pemikiran

Hizbut Tahrir, dan Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia.

BAB IV: HIZBUT TAHRIR DALAM PERGERAKAN SOSIAL-POLITIK DI

INDONESIA.

Bab ini akan mengkaji lebih dalam tentang gerakan sosial-politik *Hizbut Tahrir*

di Indonesia, Dinamika Perkembangan Hizbut Tahrir di Indonesia.

BAB V : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan, kritik, saran dan daftar pustaka.

8

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Gerakan Sosial

Di Barat, gerakan sosial merupakan kajian yang cukup populer. Gerakan ini merupakan aktivitas sosial berupa tindakan sekelompok informal dalam bentuk organisasi, dalam jumlah besar ataupun individu yang berfokus pada isu-isu sosial dan/politik dengan cara menolak, melakukan atau menyerukan sebuah perubahan sosial. Studi tentang gerakan sosial ini telah dilakukan sejak tahun 1950-an d di Amerika Serikat, yakni tentang hak-hak sipil warga berkulit hitam, studi tentang gerakan mahasiswa pada tahun 1960-an, dan di sekitar tahun 1970-1980 mangkaji tentang gerakan perdamaian, gerakan lingkungan dan gerakan solidaritas maupun gerakan perempuan. Dari semua studi tersebut melahirkan berbagai macam pendekatan dan teori gerakan sosial.

Secara teoritis, gerakan sosial terbagi menjadi dua, yaitu Gerakan Sosial Lama dan Gerakan Sosial Baru. Gerakan Sosial Lama mempunyai beberapa teori, 1) Teori masyarakat massa yang dikembangkan William Kornhuser dalam tulisannya, *The Politics of Mass Society*. Ia berpendapat bahwa denan munculnya sebuah kelompok tengah-tengah masyarakat dapat menyebabkan kategorisasi perilaku yang bisa dilihat

⁶ Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi* (Depok: UI Press, Edisi II, 2000), h. 213.

⁷ Mansour Fakih, *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996), h. 37.

dari anggota kelompok tersebut maupun dari jajaran kepemimpinannya. Kelompok ini adalah kelompok masyarakat yang merasa terasing tetapi mempunyai pengaruh di hadapan elit dalam wilayahnya da pemimpin kelompok ini memiliki potensi untuk mejadi masyarakat massa. Dengan demikian akan memicu adanya gerakan massa anti demokrasi yang memiliki tujuan mengubah bentuk masyarakat secara total.⁸

2) Teori Deprivasi Relative. Teori ini merupakan teori yang menjelaskan lebih dalam tentang teori sebelumnya, sebab fokus dalam teori ini adalah alasan psikologis yang menjadi pemicu sebuah keputusan untuk membentuk suatu gerakan sosial. Teori ini mengacu pada keadaan psikis seseorang yang merasa bahwa dirinya memiliki lebih banyak kekurangan daripada kelebihan yang ia miliki. Misalnya saja seseorang yang tidak memiliki pakaian, tempat tinggal dan makanan, ia bisa disebut sebagai deprivasi absolut. Adapun sebaliknya, jika seseorang merasa bahwa makanan atau pakaian yang ia miliki kurang cukup bisa disebut deprivasi relative.⁹

Gerakan Sosial Baru memiliki pendekatan yang berguna untuk menerangkan tentang perubahan karakater yang terdapat dalam Gerakan Sosial dan menekankan ciri khas Gerakan Sosial dalam perkembangan masyarakat industri. Teori ini merupakan respon terhadap kekurangan Marxisme klasik dalam menganalisa suatu tindakan kolektif. Tokoh teori ini mempunyai pandangan yang bertolak belakang dengan cara berpikir dari tindakan yang berlandaskan politik, budaya dan ideologi.

⁸ https://jabaronline.com/memahami-gerakan-sosial-lama-dan-gerakan-sosial-baru.html diakses pada 22 November 2021

⁹ Ihid

Contoh Gerakan Sosial Baru yang ada di Indonesia adalah gerakan yang memperjuangkan keadilan rakyat jelata seperti yang kerap terjadi di ranah hukum di Indonesia, yakni hukum tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Contoh lainnnya adalah gerakan 212 yang muncul pada tahun 2016. Gerakan ini merupakan gerakan yang tergolong dalam Gerakan Sosial Baru berdasarkan tujuan dari gerakan ini yaitu memperjuangkan keadilan hukum atas dasar sukap kegamaan atas tindakan penistaan agama yang mana pelakunya merupakan seorang elit politik.

Secara garis besar, Gerakan Sosial Lama dan Baru memiliki ciri khasnya tersendiri dan perbedaan antara keduanya cukup jelas, yang bisa dilihat dari tujuan, strategi dan strukturnya. Pemahaman seseorang atas suatu gerakan akan sangat membantu seseorang dalam mengenali gerakan tersebut ke dalam kategori gerakan bary atau gerakan lama atau bahkan gerakan yang tidak jelas tujuannya. Jelas bahwa Gerakan Sosial tak selalu melawan elit namun juga disamping itu memperjuangkan keadilan dan perubahan struktur secara total ke arah yang baik. ¹⁰

B. Teori Gerakan Politik

Gerakan politik merupakan sebuah gerakan sosial kemasyarakatan di bidang politik. Gerakan ini adalah gerakan sekelompok orang yang bekerja sama untuk memperoleh tujuan politik bersama. Gerakan politik tidak sama dengan partai yang lebih terorganisir dan memiliki anggota, bukan pula gerakan pada saat pemilu atas jabatan politik, tetapi lebih kepada gerakan politik atas dasar persamaan pandangan

-

¹⁰ Ibid.

politik demi tujuan tertentu guna meyakinkan atau menyadarkan masyarakat dan pemerintah untuk mengambil tindakan terhadap suatu masalah yang yang merupakan fokus penyebab dari gerakan tersebut.¹¹

C. Teori Perubahan Sistem Politik

Setiap sistem politik memiliki kekuatan dan kelemahan, sebagian inheren dalam sifat manusia, mencerminkan sifat dan tradisi masyarakat, bersifat struktural, kontemporer dan minor, serta merupakan harga kemajuan karena prestasi lembagalembaga politik yang ada. Sistem politik ini, bagaimanapun kekuatan dan kelemahannya, juga mengalami perubahan. Sebagian perubahan terjadi secara nyata dan sebagian lagi tidak dapat dipahami; sebagian perubahan berasal dari tindakan sengaja dan lainnya karena ketidaksengajaan, sebagian karena kemajuan dan yang lainnya karena kegagalan, sebagian melalui pertumbuhan dan lainnya melalui kelapukan, serta sebagian berlangsung cepat dan sebagian berlangsung lambat. 12

Dalam setiap hal, perubahan sudah merupakan hukum kehidupan, baik di zaman kuno maupun pada tahun 1984, dalam kapitalisme maupun sosialisme, dalam diktator maupun dalam demokrasi. Salah satu masalah utama yang dihadapi individu maupun penguasa negara ialah memandang perlunya transformasi dan pengarahan untuk perubahan sesuai dengan arah yang mereka rasa berguna dan bermanfaat, dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tak seorang pun untuk waktu yang lama, dapat menahan kekuatan-kekuatan yang membutuhkan perubahan tanpa menimbulkan

¹¹ https://id.wikipedia.org/wiki/Gerakan politik, diakses pada tanggal 20 November 2021

¹² Ibid

revolusi.13

Dalam suatu masyarakat demokratis yang terbuka, perubahan sistem politik berlangsung terus dan permanen. Perubahan ini biasanya terjadi secara damai dan perlahan-lahan, walaupun sering pula tidak secara mudah. Dalam suatu sistem diktator atau sistem otoriter, beberapa perubahan berasal dari desakan arus bawah dan meluas ke seluruh masyarakat. 14

Namun sistem membatasi dan berusaha mengarahka arus informasi dan inovasi, karena dalam sistem ini perubahan-perubahan besar membutuhkan persetujuan, bahkan keputusan pemimpin. Setiap orang menyadari bahwa perubahan sistem politik mempengaruhi hidupnya sehari-hari dan peranannya di masa depan, sehingga ia harus menyesuaikan diri dengan faktor-faktor inovasi yang penting baginya. Sama halnya, setiap sistem politik pasti harus menyesuaikan diri dengan masalah-masalah yang muncul di masyarakat dan mengubah cara pandang mereka terhadap masa depan. Sehingga setiap orang, penguasa, negara, dan sistem politiknya harus tanggap mengendalikan munculnya berbagai kekuatan baru dan memperkenalkan perubahan ini. 15

D. Hipotesa

1. Konsep Pemikiran Hizbut Tahrir

Islam militan memiliki suatu karakteristik di antaranya adalah pemahaman dan

¹³ Robert F. Byrnes, *Perubahan dalam Sistem Politik Soviet*, dalam Roy C. Macridis, *Perbandingan Politik; Catatan dan Bacaan* (Jakarta: Airlangga, 1992), h. 211-212

¹⁴ Ihid

¹⁵ *Ibid*.

pendekatan nalar literalis teks sebagai dasar pemikiran yang digunakan. Nalar literalis dan tekstualis terhadap Al-Qur'an dan Sunnah berimplikasi pada realisasi keagamaan yang cenderung ekslusif. Mereka meyakini dengan absolut bahwa Islam adalah satusatunya agama paling benar dan sistem yang dibangunnya merupakan sistem terbaik dibanding dengan sistem atau produk buatan manusia.

Pemahaman dan pemikiran Hizbut Tahrir menolak filsafat, hermeneutik, kapitalis, paham sekuler-liberal dan semua paham yang bertentangan dengan agama Islam. Seperti sikap kritis Hizbut Tahrir terhadap kapitalisasi pendidikan, pertanahan dan ekonomi yang ada di Indonesia. ¹⁶ Pendiri Hizbut Tahrir, Taqiyuddin Al-Nabhani menggaris bawahi bahwa semua pemikiran yang tidak bersumber dari Islam harus ditolak dan membahayakan umat Islam karena menurutnya dasar yang harus diterapkan yakni hukum Syara' murni yang tidak dicampuri interpretasi yang sesat seperti yang terdapat dalam tesisnya; *at-Tafkir*. ¹⁷

Pemikiran al-Nabhani anti filsafat dan menyerang paham yang bersebrangan dngan Islam. Pemahaman tersebut menjadi landasan berpikir dan nalar keagamaan anggota Hizbut Tahrir. Al-Nabhani juga mengritik dengan tajam filosof muslim dan ulama' yang pro kepada pemikiran Islam liberal. Hal yang paling mendesak bagi Hizbut Tahrir adalah mengubah masyarakat Islam melalui pemikiran Islam yang rasional, yaitu pemikiran yang berdasar kepada Al-Qur'an dan hadis. Metode berpikir

¹⁶ Azman. *Gerakan dan Pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia*. Jurnal Ad-Daulah Vol 7 No. 1 Juni 2018. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, h. 5.

¹⁷ Al-Nabhani, Al-Tafkir (Hizb Al-tahrir, 1953), h. 141-142.

inilah yang dijadikan Hizbut Tahrir sebagai *tsaqafah* dalam berpikir Islami. Hizbut Tahrir juga cenderung sangat selektif dengan bacaan dan kajian-kajian yang bertentangan dengan Islam. Pemikiran tentang sastra, politik, hukum, akidah, ekonomi dan lain sebagainya harus sesuai dengan syariat Islam. Terlihat dengan jelas militansi pemikiran Hizbut Tahrir terhadap pemikiran yang bertentangan dengan pemikiran Hizbut Tahrir.¹⁸

. .

¹⁸ *Ibid*.

BAB III

PEMIKIRAN DAN PERGERAKAN HIZBUT TAHRIR

A. Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir

1. Profil Taqiyuddin al-Nabhani

Pendiri Hizbut Tahrir bernama lengkap Muhammad Taqiyuddin ibn Ibrahim ibn Mustafa ibn Yusuf al-Nabhani. Al-Nabhani sendiri merupakan nama dari sebuah kabilah, yaitu Bani Nabhan, merupakan orang Arab yang berhuni di Palestina. Pemukiman mereka berada di wilayah Ijzim di mana masih termasuk wilayah Palestina Utara, tepatnya wilayah Haifa. Al-Nabhani sendiri lahir pada tahun 1909 M dan wafat pada tahun 1977 M. Makamnya berada di al-Auza'i Beirut.

Ayah al-Nabhani merupakan seorang guru yang mengajar ilmu syariah di Kementrian Pendidikan Palestina. Sehingga, dengan profil orangtua tersebut, al-Nabhani mendapatkan pendidikan agama yang cukup kuat dalam lingkungan keluarganya. Ibu al-Nabhani juga cukup paham tentang ilmu syariah atas didikan ayahnya yang merupakan seorang ulama besar pada zaman Dinasti Umaniyyah, bernama Yusuf ibn Ismail ibn Yusuf an-Nabhani. Wawasan keilmuan dan pandangan hidup al-Nabhani sangat terpengaruh oleh keluarganya, terbukti pada usia 13 tahun, al-Nabhani sudah hafal Al-Qur'an.¹⁹

Taqiyuddin al-Nabhani pernah menimba ilmu hukum Islam di Universitas Al-Azhar, Kairo, Mesir. Al-Nabhani setelah menyelesaikan pendidikannya di sana

-

¹⁹ Ihsan Samarah, *Op. Cit.* h. 140-145.

kemudian menjadi seorang guru sekolah, kepala juru tulis dan menjadi hakim di Pengadilan Palestina. Namun, pada tahun 1951, al-Nabhani merantau ke Yordania dan resign dari semua pekerjaan dan jabatan formal yang ia duduki.²⁰

Taqiyuddin al-Nabhani semasa hidupnya telah berpindah-pindah ke berbagai negara, di antaranya Palestina, Mesir, Yordania, Libanon dan Syria. Hizbut Tahrir yang ia dirikan tampaknya merupakan responnya terhadap kolonialisme Barat dan akibat jatuhnya khilafah Turki Utsmani pada tahun 1924, terpecah-belahnya umat Islam ke beberapa negara. Untuk itu ia mempunyai cita-cita besar yakni menyatukan negara-negara Islam di Arab dan umat muslim sedunia di bawah naungan satu pemerintahan; Khilafah.

Keinginan al-Nabhani tersirat dalam beberapa karyanya, yakni membebaskan negara-negara Islam dari cengkraman barat. Al-Nabhani mendikotomikan Islam dan Peradaban Barat sebab ia memandang bahwa Islam merupakan suatu prinsip yang sangat lengkap, sedangkan ideologi modern dan paham yang bersumber dari barat lebih inferior dibandingkan dengan yang terdapat dalam Islam.

2. Awal Mula Berdirinya Hizbut Tahrir

Hizbut Tahrir merupakan organisasi politik berideologikan Islam dengan skala internasional dan aktif memperjuangkan dakwah Islam. Pendirinya adalah Taqiyuddin al-Nahbani, seorang ulama besar dan pernah menjadi hakim agung di Mahkamah Isti'naf, Palestina.²¹ Kepemimpinan Taqiyuddin al-Nabhani kemudian diganti oleh

.

²⁰ *Ibid.* h. 4.

²¹ *Ibid* h 5

Abdul Qadim Zallum setelah meninggalnya beliau, hingga tahun 2003. Kini tampuk kepemimpinan ada pada Syaikh Atha' Abu Rastah.²²

Kaum Yahudi sulit untuk membangun negara Israel di Palestina saat Turki Utsmani masih ada. Semua itu berubah sejak runtuhnya kekhilafahan Turki Utsmani pada tahun 1924 dan digantikan oleh kepemimpinan Mustafa Kemal At-Taturk. Hal ini menyebabkan wilayah dan kekuasaan umat Islam terbagi menjadi beberapa negara. Kehancuran umat Islam ini sudah dirasakan sejak umat Islam terjebak ke dalam perang melawan sekutu dan kalah dalam perang tersebut, yakni di Perang Dunia I. Menteri Luar Negeri Inggris pada saat itu yang bernama Balfour memberikan janji kepada Yahudi agar bisa menjadikan Palestina sebagai tanah air meraka. Janji tersebut didasarkan sebagai imbalan Yahudi yang telah membantu Inggris dan Amerika selama Perang Dunia I. Israel kemudian memproklamirkan kemerdekaanny menjadi sebuah negara yang sah pada tahun 1948 dan mendapat pengakuan dari PBB dan Amerika Serikat.²³

Dikarenakan umat Islam tidak lagi di bawah satu naungan, yakni Khilafah Islamiyah, menjadi tidak berdaya terhadap penjajahan yang dilakukan oleh Barat dan banyak umat Islam yang hanya pasrah dan tunduk pada penjajah.²⁴

Peristiwa yang terjadi pada masa itu terhadap Palestina dan negara-negara Islam

²² Endang Turmudzi dan Riza Sihabudin, *Islam dan Radikalisme di Indonesia* (Jakarta: LIPI Press, 2006), h. 266.

²³ M. Riza Sihbudi & Ahmad Hadi, *Palestina: Solidaritas Islam dan Tata Politik Dunia Baru* (Jakarta: Pustaka Hidayah, 1992), h. 103.

²⁴ Mardiansyah Mulyaji, "*Taqiyuddin an-Nabhani 1953-1977* (*Suatu Tinjauan Historis tentang Perjuangan Hizbut Tahrir di Palestina*)" (Skripsi S1 Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2014), h. 42.

lainnya memengaruhi Taqiyuddin yang kemudian mempunyai cita-cita untuk membebaskan dan memerdekakan Palestina.²⁵ Ia berkesimpulan bahwa di seluruh negeri Islam, belum ada satupun kelompok yang mampu membangkitkan Islam ke masa kejayaannya. Semua kelompok tersebut gagal dikarenakan berdiri atas dasar yang kurang tepat.²⁶

Setelah menelaah lebih dalam atas berbagai kelompok yang ada, Taqiyuddin an-Nabhani mendirikan sebuah parta politik bernama Hizbut Tahrir (Partai Pembebasan). Tujuan Taqiyuddin tidak hanya untuk membangkitkan Islam, tetapi juga mendirikan Khilafah Islamiyah, memerdekakan Palestina dan menyelamatkannya dari para penjajah.²⁷

Terhitung sejak tanggal 14 Maret 1953, Hizbut Tahrir resmi menjadi partai yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, Hizbut Tahrir memiliki hak atas segala aktivitas kepartaiannya dan dilindungi oleh undang-undang. Akan tetapi, Departemen Dalam Negeri Yordania mengirim surat kepada Hizbut Tahrir terkait larangan atas segala aktivitasnya. Hal ini membuat Hizbut Tahrir menjalankan aktivitasnya secara rahasia dengan bantuan Abdur Qadim Zallum dan Ahmad ad-Daur. Sepeninggalnya Taqiyuddin al-Nabhani, kepemimpinan Hizbut Tahrir dipegang oleh Abdul Qadim Zallum.

²⁵ *Ibid*.

²⁶ *Ibid*, h. 45.

²⁷ *Ibid.* h. 46.

²⁸ Ihsan Samarah. *Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani Meneropong Perjalanan Spiritual Dakwahnya* (Bogor: Al-Azhar Press, 2003), h. 23.

²⁹ Husain bin Muhammad bin Ali Jabir, *Menuju Jamaatul Muslimin: Telaah Sistem Jamaah dalam Gerakan Islam.* Terj. Aunur Rafiq (Jakarta: Rabbani Press, 2009), h. 244.

Di bawah naungan Abdul Qadim Zallum, Hizbut Tahrir berkembang cukup pesat dan kader-kadernya pun menyebar ke banyak negara. Pada masa kepemimpinannya tersebut, Markas Hizbut Tahrir pindah ke London. Perkembangan Hizbut Tahrir tak hanya di negara timur tengah saja. Namun juga ke berbagai negara di Eropa, Asia dan Afrika seperti Mesir, Sudan, Turki, Aljazair, Pakistan, Kirgistan. Amerika Serikat, Rusia, Jerman, Perancis, Belanda, Austria, Uzbekistan, Malaysia, Australia hingga Indonesia.

B. Landasan dan Pemikiran Hizbut Tahrir

Setelah melakukan banyak kajian, studi dan penelitian terhadap kondisi umat, Hizbut Tahrir juga mengkaji tentang sirah Nabi selama di Madinah. Dari hal tersebut, Hizbut Tahrir kemudian memilih dan menetapkan beberapa ide, pendapat dan hukum yang berkesinambungan dengan fikrah dan thariqah yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan untuk menyokong aktivitas dakwahnya, yakni berdirinya khilafah Islamiyah.³⁰

Adapun gagasan, pendapat, ide dan hukum-hukum yang telah dikaji Hizbut Tahrir tersebut dihimpun dan dicetak dalam berbagai karya seperti buku, majalah, selebaran, booklet yang kemudian disebarluaskan kepada umat. Buku-buku Hizbut Tahrir di antaranya adalah:

20

- a. Nidham al-Islam
- b. Nidham al-Hukmi fi al-Islam

³⁰ Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir, h. 35-36

_

- c. Nidham al-Iqtishadi fi al-Islam
- d. Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam
- e. At-Takattu al-Hizbiy
- f. Mafahim Hizb at-Tahrir
- g. Daulah al-Islamiyah
- h. Al-Khilafah
- i. Syakhshiyah al-Islamiyah
- j. Mafahim as-Siyasiyah li Hizb at-Tahrir
- k. Nadharat as-Siyasiyah li Hizb at-Tahrir
- l. Kaifa Hudimat al-Khilafah
- m. Siyasatu al-Iqtishadiyah al-Mutsla
- n. Al-Amwal fi Daulah al-Khilafah
- o. Nidham al-Uqubat fi al-Islam
- p. Ahkam al-Bayyinat
- q. Muqaddimat ad-Dustur

Hizbut Tahrir memiliki tujuan yakni meneruskan Islam dan menyebarkan dan memperluas dakwah Islam ke penjuru dunia. Hal ini seperti yang sudah tercantum dalam kitab Hizb at-tahrir. Tujuan ini berarti membawa kembali kehidupan umat Islam seperti saat adanya Darul Islam, yakni di mana masyarakat Islam seluruhnya menjalankan apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah, sistem pemerintahan sesuai dan berdasar dengan al-Qur'an dan sunnah serta berdakwah dan jihad fi

sabilillah.31

Aktivitas dakwah Hizbut Tahrir berotientasi pada perubahan masyarakat yang awalnya rusak menjadi masyarakat Islami. Perubahan tersebut dimulai dengan mengubah pemahaman dan ideologi menyimpang yang diderita masyarakat. Dengan demikian pemikiran Islam akan menjadi pemikiran umum dan mendorong masyarakat dalam menerapkan dan menjalankannya. Aktivitas dakwah Hizbut Tahrir bisa dikategorikan menjadi tiga tahap:

- Pembinaan umat Islam dengan pemikiran Islam. Hal ini dilakukan agar umat kembali kepada ajaran dan akidah-akidah Islam serta menjauhi dan meninggalkan ajaran dan pemikiran kufur.
- 2) Pergolakan Pemikiran. Tahap ini adalah tahap memerangi ideologi-ideologi dan sistem yang salah serta merusak Islam dan akidahnya. Menjelaskan dan menampakkan akidah-akidah dan konsepsi yang salah serta menjelaskan hukumnya dalam Islam
- 3) Perjuangan Politik. Yakni perjuangan politik dalam membebaskan umat Islam dari kekuasaan kaum kafir penjajah, menghapus akar-akar pemikiran, ekonomi, budaya dan apa yang mereka bawa di seluruh dunia.³²

Dalam menjalankan dakwahnya, Hizbut Tahrir memiliki metodenya sendiri. Ada tiga tahap, yaitu:

1. Tahap pembinaan. Tahap ini merupakan tahap awal, yaitu dengan mulai

³¹ Al-Nabhani, *Hizb at-Tahir*, h. 25

³² Abu Za'rur, *Seputar Gerakan Islam*. Bogor: Al-Azhar Press. h. 211

- membina kader-kader dengan keyakinan terhadap ideologi dan metode dari Hizbut Tahrir. Hal ini bertujuan untuk membentuk adanya organisasi.
- 2. Tahap interaksi. Hizbut Tahrir bertujuan agar masyarakat Islam lebih terfokus pada Islam sebagai permasalahan utama, yakni supaya masyarakat Islam merealisasikan ajaran Islam dalam realita kehidupan.
- 3. Tahap penerimaan kekuasaan pemerintah dan menerapkan ajaran Islam. Yakni sebuah realisasi Islam secara total dan mengembangkan ajaran Islam ke seluruh penjuru dunia.

Diharapkan dengan seluruh tahapan yang ada tersebut negara Islam atau Daulah Islamiyah berdiri dan menerapkan undang-undang yang telah dipersiapkan sebelumnya.

C. Latar Belakang Berdirinya Hizbut Tahrir Indonesia

Di Indonesia, Hizbut Tahrir mulai masuk pada tahun 1980 di masa orde baru. Namun ide-ide Hizbut Tahrir sudah masuk ke Indonesia sejak 1972 dan berkembang dengan perlahan. Gerakan Hizbut Tahrir menjadi sedikit intensif saat Abdurrahman al-Baghdadi yang merupakan aktivis Hizbut Tahrir dari Australia menetap di Bogor tahun 1982-1983. Hal itu bermula saat Abdurrahman al-Baghdady memberikan ceramah tentang kewajiban tegaknya khilafah di Australia yang kemudian bertemu dengan Abdullah bin Nuh, seorang ulama, sastrawan dan pejuang dari Indonesia. Dari pertemuan tersebut Abdullah bin Nuh mengajak Abdurrahman al-Baghdadiy ke Indonesia dan tinggal di Bogor. Abdurrahman Al-Baghdadiy memulai dakwahnya dan

memperkenalkan Hizbut Tahrir ke berbagai tempat seperti kampus dan pondok pesantren. Dalam aktivitas dakwahnya tersebut muncul pengajian-pengajian yang membahas dan menjelaskan tentang Hizbut Tahrir.³³

Hizbut Tahrir kemudian tersebar ke seluruh Indonesia melalui kampus-kampus seperti Universitas Padjadjaran, IKIP Malang, Unhas, Unair dan lain sebagainya. Anggota Hizbut Tahrir kebanyakan dari kalangan terpelajar, baik mahasiswa maupun dosen serta pelajar pada umumnya. Cabang Hizbut Tahrir tersebar di seluruh Indonesia, terutama pada tahun 1990-an pengaruh dan penyebarannya semakin marak dan menembus berbagai lapisan masyarakat. Hal ini dikarenakan kader Hizbut Tahrir yang memulai dakwahnya di kantor-kantor, masjid, pabrik, perumahan dan menyebarkan gagasan serta ideologinya melalui selebaran media cetak dan online. Media cetak seperti buku-buku, majalah, bulletin digunakan Hizbut Tahrir dalam memperluas penyebaran gagasannya dan menjadi wadah membahas isu-isu politik yang ada.³⁴

Dalam masa Orde Baru, Hizbut Tahrir melakukan dakwahnya dengan metode pengkaderan dan pembinaan secara rahasia. Banyak anggota dan struktur organisasi tidak pernah dipublikasi. Hal ini disebabkan pada masa Orde Baru terdapat kebijakan politik yang antipasti terhadap kelompok radikal sehingga Hizbut Tahrir terpaksa melakukan dakwahnya dengan cara rahasia. 35

_

³³ Ismail Yusanto, "Berdirinya Khilafah Islamiyah Tidak Utopis", Majalah Madina, no. 11, h. 24.

³⁴ Kurniawan Abdullah, "Gerakan Politik Islam ekstraparlementer: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia" (Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, 2003), h. 49.

³⁵ M. Zaki Mubarak, Geneologin Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek

Aktivitas Hizbut Tahrir di Indonesia merupakan aktivitas politik dan mengemban dakwah Islam. Gerakan politik Hizbut Tahrir di Indonesia merupakan gerakan yang berfokus untuk menyadarkan masyarakat akan hukum-hukum Allah dan menyeru tentang berdirinya khilafah Islamiyah. Pada tahun 2002 Hizbut Tahrir mengadakan konferensi internasional tentang Khilafah Islamiyyah di Jakarta. Dalam acara tersebut hadir tokoh-tokoh Hizbut Tahrir Internasional, organisasi Islam, organisasi lain, dan tokoh nasional. Konferensi tersebut dihadiri oleh kurang lebih 5000 peserta.³⁶

Adanya konferensi tersebut memulai langkah baru bagi Hizbut Tahrir di Indonesia, yakni secara resmi melakukan dakwah dan aktivitasnya secara terangterangan. Acara tersebut terbilang sukses karena berhasil melanjutkan kegiatannya dengan berdemo untuk menentang Amerika yang menyerang Afganistan. Selanjutnya, pada siding MPR tahun 2002, Hizbut Tahrir mengadakan kegiatan berupa long march dengan sekitar 12.000 peserta dengan agenda penuntutan penerapan syariat Islam. Dengan kegiatan yang sama. Long march diadakan dengan sekitar 20.000 kader yang menyerukan penerapan syariat Islam dan berdirinya Daulah Islamiyah yang terselenggara di Monas sampai dengan Bundaran HI.³⁷

_

Demokrasi (Jakarta: LPS3S, 2008), h. 243.

³⁶ Hizbut Tahrir, Mengenal Hizbut Tahrir: Partai Politik Islam Ideologis, h. 24

³⁷ Ahmad Syafi'I Mufid, *Perkembangan Paham Keagamaan Transasnsional di Indonesia* (Jakarta: Litbang dan Diklat Kemenag RI, 2011), h. 5

BAB IV

PARTISIPASI HIZBUT TAHRIR DALAM PERGERAKAN SOSIAL-POLITIK DI INDONESIA

A. Hizbut Tahrir Sebagai Gerakan Sosial-Politik

1. Hizbut Tahrir Sebagai Gerakan Sosial

Hizbut Tahrir dalam hal ini peneliti lihat lebih sebagai ormas Islam yang menggaungkan Khilafah Islamiyyah. Strategi dakwah mereka lakukan lebih ke arah strategi gerakan sosial. Menurut Eyerman & Jamison, gerakan sosial adalah tindakan kolektif yang terorganisir, tujuannya adalah perubahan sosial. Lebih tepatnya adalah sebuah kelompok yang terdiri dari banyak individu yang memiliki tujuan sama, yakni menyuarakan ketidakpuasan secara bersama di depan khalayak umum dan mengubah basis sosial dan politik yang dianggap tidak memuaskan tersebut.³⁸

Hizbut Tahrir dilihat dalam pandangan gerakan sosial dapat ditinjau dalam dua tipe. **Pertama**, gerakan yang berbeda dengan tujuan perubahan yang diinginkan. Dalam hal ini, menurut Sztompka, gerakan tipe pertama ini ada dua macam, yang pertama memusatkan perubahan pada struktur sosial, sedangkan yang kedua pada perubahan individual.

Gerakan perubahan struktural ada dua tipe, 1) gerakan sosial politik yang upayanya adalah perubahan stratifikasi politik, ekonomi dan kelas. 2) gerakan sosio-kultural yang bertujuan mengubah aspek yang kurang menonjol dalam kehidupan

_

³⁸ Piotr Sztompka, Sosiologi Perubahan Sosial, h. 326.

sosial, perubahan keyakinan, norma, simbol, nilai dan pola kehidupan setiap hari.

Sedangkan gerakan yang targetnya adalah individual memiliki dua tipe: 1) gerakan suci dan religious yang bertujuan mengubah targetnya dari segi agama dan mengobarkan dan menghidupakn semangat keagamaannya. 2) gerakan sekuler, tujuannya bukan pada agama targetnya, melainkan kepada sisi mental dan moral mereka.

Hizbut Tahrir jika dilihat dari gerakan sosial ini lebih merupakan sebuah gerakan yang berorientasi individual. Pasalnya, mereka berasumsi bahwa dengan meningkatnya kualitas individual dari sana pula perubahan tatanan sosial yang lebih baik akan tercipta.

Kedua, gerakan sosial yang berbeda dengan "arah perubahan yang diinginkan". Artinya gerakan ini pada awalnya positif, namun ketika dimobilisasi untuk merespon gerakan positif menjadi berubah arah negatif. Perubahan negatif tersebut merupakan dampak sampingan yang tidak diharapkan muncul. Contohnya adalah gerakan untuk mempertahankan budaya asli pribumi, revitalisasi ciri khas nasional atau etnis, atau menegaskan keyakinan fundamental agama. Hizbut Tahrir peneliti lihat termasuk dalam dua tipe gerakan di atas. Teori gerakan sosial yang dikemukakan oleh Sztomka peneliti anggap sebagai landasan teori yang paling tepat dalam hal ini.

2. Hizbut Tahrir Sebagai Gerakan Politik

Hizbut Tahrir merupakan partai politik sejak awal berdirinya. Namun, di Indonesia, Hizbut Tahrir realitanya lebih ke arah gerakan sosial. Gerakan sosial merupakan perubahan sosial dengan tindakan kolektif dan terorganisir. Hizbut Tahrir Indonesia bisa dianggap sebagai gerakan politik. Pasalnya gerakan politik merupakan gerakan yang mengatur kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Hizbut Tahrir dalam hal ini tujuan utamanya adalah menegakkan Khilafah Islamiyyah sebagai sistem sebuah negara. Dalam upaya mewujudkan cita-cita besar tersebut, Hizbut Tahrir berjuang dengan cara berpolitik kultural, yakni melakukan kaderisasi dan mengedukasi masyarakat agar kesadaran mereka tumbuh.

Hizbut Tahrir Indonesia tidak ikut serta dalam pemilu, bisa dikatakan kemungkinan sebabnya adalah Hizbut Tahrir mengangap bahwa demokrasi merupakan sistem pemerintahan kufur dan pemilu bukanlah satu-satunya jalan keluar atas misi politik yang diusungnya, yaitu mendirikan negara khilafah. Dengan tidak ikut sertanya dalam pemilu di Indonesia, Hizbut Tahrir bisa disimpulkan sebagai gerakan sosial-politik, terbukti dengan sesuainya ciri-ciri gerakan sosial dan pergerakan Hizbut Tahrir yang sesuai pula dengan gerakan politik, yakni gerakan kelompok yang mempunyai metode, tujuan, ideologi dan sangat terorganisir.

B. Dinamika Hizbut Tahrir di Indonesia

Banyak tantangan, kendala, dan fitnah yang sering dihadapi oleh Hizbut Tahrir selama dakwahnya yang hampir setengah abad ini. Tantangan tersebut muncul dari pihak Barat dan masyarakat Islam sendiri. Tantangan Hizbut Tahrir yang berasal dari barat dikarenakan ketakutan mereka akan kebangkitan umat Islam dan kembali tegaknya khilafah Islamiyah yang selama ini diperjuangkan atas ketegakannya. Sebab itulah Hizbut Tahrir mereka anggap sebagai ancaman akan eksistensi masa depan

mereka. Tak hanya barat, rezim sekuler pun terancam kedudukannya karena mereka merupakan kaki-tangan Barat. Sedangkan dari pihak umat Islam sendiri banyak muncul tantangan dikarenakan ketidaktahuan mereka dan kesalahpahaman yang ada serta kebencian mereka terhadap Hizbut Tahrir.³⁹

Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada masa pemerintahan Orde Baru. Di mana perpolitikan pada masa itu tidak bisa leluasa dan bebas seperti halnya pada masa Reformasi. Tak hanya masyarakat yang tidak bisa menyuarakan aspirasi dan pendapatnya pada masa itu, tetapi juga Hizbut Tahrir terhambat pergerakan dan dakwahnya karena gaya otoriter yang diterapkan oleh Soeharto selama Orde Baru. ⁴⁰

Tak hanya karena pemerintah, hambatan perkembangan yang dirasakan Hizbut Tahrir juga karena adanya organisasi dan partai politik yang ada di Indonesia. Pada masa reformasi, Hizbut Tahrir melebarkan sayapnya ke seluruh penjuru Indonesia. Namun hambatan dan tuduhan miring dari berbagai pihak pun tak kunjung surut di tengah dakwah dan perjuangan mereka untuk merekrut dan menambah anggotanya. Hal-hal yang dianggap sebagai hambatan tersebut di antaranya:

 Hizbut Tahrir Indonesia hanya dianggap berwacana dan tanpa tindakan nyata.

Memang pada dasarnya Hizbut Tahrir memunculkan banyak gagasan, wacana, dan pemikiran melalui buku-buku, bulletin, selebaran dan media

-

³⁹ Artikel dari www,globalmuslim.web.id/2008/08/hizbut-tahrir-menjawab-tuduhan-miring.html, dikases pada tanggal 20 November 2021.

⁴⁰ Ibid.

online yang mereka punya. Tetapi Hizbut Tahrir tidak hanya berwacana saja tanpa adanya tindakan nyata, karena adanya Hizbut Tahrir itu sendiri merupakan sebuah tindakan nyata dan keprihatinan atas keadaan umat Islam, sehingga mereka pun terus berdakwah untuk menyebarkan ajaran dan wawasan Islami serta mengajak umat Islam agar menerapkan ajaran agamanya.

2. Hizbut Tahrir hanya dianggap berpolitik saja tanpa memperdulikan masalah akidah, akhlak dan ibadah.

Anggapan itu muncul sebab adanya kesalahpahaman atas makna politik yang cenderung tidak dipahami sebagaimana mestinya. Padahal Islam menganggap politik sebagai segala hal yang mengatur dan memelihara seluruh urusan umat, urusan luar maupun dalam negeri. Padahal Hizbut Tahrir sangat memedulikan urusan umat. Sehingga dalam dakwah mereka selalu menyerukan tentang penegakan syariat Islam dan Khilafah Islamiyah sebagai solusi atas permasalahan di tubuh umat Islam yang saat ini sedang dalam kondisi terpuruk dan tertinggal oleh peradaban Barat.

3. Hibut Tahrir Indonesia dianggap sebagai kelompok yang anti Sunnah.

Anti Sunnah atau ingkar hadis adalah kelompok yang menolak bahwa hadis/Sunnah Rasulullah sebagai dasar dan sumber hukum Islam. Mereka yang menolak hadis sebagai sumber hukum Islam sama seperti halnya al-Qur'an termasuk dalam perbuatan kufur. Sedangkan Hizbut Tahrir merupakan gerakan yang tidak menolak hadis dan menyatakan bahwa

meskipun suatu negara tidak menganut suatu madzhab tertentu, mereka harus menentukan dalil mana yang digunakan dan mana yang tidak bisa digunakan dalam menjalankan perintah agama Islam.

4. Hizbut Tahrir Indonesia dicap sebagai muktazilah dengan gaya baru atau neo-muktazilah yang menjunjung tinggi akal.

Anggapan ini bisa muncul karena kebodohan dan ketidaktahuan akan muktazilah dan Hizbut Tahrir itu sendiri sehingga menganggap keduanya sama. Hibut Tahrir berbeda dengan Muktazilah yang mengedepankan akal di atas teks nash dalam setiap permasalahan yang ada. Sedangkan Hizbut Tahrir mengalisa dengan fakta, akal, dan menggunakan metode berpikir yang benar.

 Hizbut Tahrir Indonesia dianggap sebagai kelompok radikal dan sempalan dari teroris serta militant

Propaganda Barat adalah menggunakan istilah terorisme sebagai cap atas semua gerakan, organisasi dan pihak-pihak yang bersebrangan dengan mereka, terutama terhadap Islam. Militan dan terorisme identik dengan kekerasan, sedangkan Hizbut Tahrir Indonesia melarang keras tindak kekerasan dalam operasi dakwah yang mereka perjuangkan. Hal tersebut dikarenakan sangat bertentangan dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah Saw. Tidak ada ruang sedikitpun bagi kekerasan dan militansi dalam metode dakwah Hizbut Tahrir Indonesia, karena mereka selalu berusaha semaksimal mungkin untuk meniru metode dakwah Rasulullah.

Berbagai tuduhan tersebut muncul sebagai respon untuk menjatuhkan nama Hizbut Tahrir. Padahal fakta yang ada, dakwah Hizbut Tahrir selalu berdasar pada al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas. Munculnya hambatan dan tuduhan yang semakin marak tersebut tidak menyurutkan mental Hizbut Tahrir dalam menyebarkan ajaran dan dakwahnya ke seluruh penjuru Indonesia. Meskipun Hizbut Tahrir dan aktivisnya mendapatkan tantangan tersebut, mereka tidak berhenti menyebarkan ajarannya sampai terwujudnya Khilafah Islamiyah di muka bumi.

Pada tahun 1998-1999, Hizbut Tahrir Indonesia hadir di Kota Medan. Periode tersebut bertepatan dengan momentum reformasi dan kebangkitan rakyat Indonesia di mana ada ruang yang sangat terbuka bagi berdirinya banyak partai, kebebasan berorganisasi dan berpendapat di muka umum. Hizbut Tahrir muncul di Sumatera Utara didalangi oleh beberapa mahasiswa dari Universitas Islam Sumatera Utara dan Institur Teknik Meda. Mereka adalah Musa Abdul Ghani, Nur Khalifa, Hasanuddin Husin, Ahmad Wajir, dan Yusran Ramli yang merupakan bagian dari aktivis lembaga dakwah kampus (LDK).⁴²

Hizbut Tahrir tak hanya tersebar di Jawa saja, namun perkembangannya sampai ke seluruh penjuru Indonesia. Pada tahun 1994 Hizbut Tahrir memperluas dakwahnya ke Makassar. Hal tersebut bermula dari seorang Mahasiswa Universitas Muslim Indonesia yang tertarik dengan ideology yang diusung Hizbut Tahrir yang ia baca dari

⁴² *Ibid. h.* 49.

⁴¹ Majalah Al-Wa'ie dalam Fitrina Hasanah, *Peranan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sebagai Organisasi Non Partisan (Dalam Perspektif Khilafah*, 2016), h. 42.

Majalah Al-Wa'ie yang kemudian ditindaklanjuti dengan mengikuti halaqahnya di Malang.⁴³

Pada tahun 1998-1999 seluruh LDK di Indonesia mengadakan pertemuan di Malang, Jawa Timur. Dalam pertemuan tersebut, aktivis LDK Medan bertemu dengan aktivis Hizbut Tahrir Indonesia. Setelah kembali ke Medan, aktivis LDK dari Sumatera Utara tersebut tertarik dengan Hizbut Tahrir dan ideologi yang dibawanya serta ingin mengkaji lebih dalam tentang hal tersebut. Maka dari itu, mereka pun mendatangkan utusan Hizbut Tahrir Indonesia Pusat yang bernama Ustadz Izuddin dari Surabaya. Kemudian beberapa tokoh awal Hizbut Tahrir Sumatera Utara tersebut ditindaklanjuti keanggotaannya di Hizbut Tahrir Indonesia.

Perjalanan dakwah Hizbut Tahrir Indonesia hanya sampai pada tanggal 19 Juli 2017 karena pemerintah Indonesia melalui Kemenkumhamnya secara resmi membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia dengan mencabut izin badan hukum ormas tersebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor 30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum ormas Hizbut Tahrir Indonesia. Hal tersebut sebagai tindak lanjut atas Perppu Nomor 2 tahun 2017 yang mengubah UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Setidaknya ada tiga alasan utama dalam pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Menteri Polhukam Wiranto sebagai berikut:

⁴³ Nurhidayat. *Hizbut Tahrir Di Makassar 1994-2012*, (Makassar: Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Makassar) h. 11.

- Hizbut Tahrir Indonesia sebagai ormas berbadan hukum tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam pembangunan guna mencapai tujuan nasional.
- Kegiatan yang dilakukan Hizbut Tahrir Indonesia terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas dan ciri yang berdasakan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.
- 3. Aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan Negar Kesatuan Republik Indonesia.

Selain tiga alasan utama di atas, telah banyak statement dari aktivis Hizbut Tahrir Indonesia yang menentang dan mengatakan bahwa dasar negara Pancasila dan UUD 1945 sebagai sistem thagut. Di mana hal tersebut sangat menimbulkan keresahan di masyarakat. Akibatnya keresahan masyarakat akan hal itu mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan berupa Perppu tentang Organisasi Masyarakat yang akhirnya membuat Hizbut Tahrir Indonesia dibubarkan.⁴⁴

Hizbut Tahrir Indonesia tidak hanya pasrah dan menerima keputusan tersebut, mereka mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi dengan gugatan judicial review atas Perppu tentang Ormas pada tanggal 18 Juli 2017 didampingi oleh kuasa hukumnya, Prof. Yusril Ihza Mahendra. Dalam gugatan tersebut, Hizbut Tahrir

⁴⁴ Artikel dari https://id.wikipedia.org/wiki/Pembubaran_Hizbut_Tahrir_Indonesia, diakses pada tanggal 22 November 2021

Indonesia memiliki maksud agar beberapa pasal yang berpotensi multitafsir agar dibatalkan. Selain itu, ada ketidakjelasan dalam definisi tentang ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menolak *judicial review* terhadap Perppu nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Masyarakat pada tanggal 12 Desember 2017. Penolakan tersebut dikarenakan satu poin pertimbangan, yakni penggugat atau pemohon telah kehilangan objek perkara dikarenakan Perppu Ormas yang diajukan uji materi sudah disahkan dan menjadi undang-undang oleh DPR.

Tidak hanya pengajuan gugatan di Mahkamah Konstitusi, Hizbut Tahrir dan ormas Islam lainnya menggelar aksi demo penolakan Perppu pembubaran ormas di Monas, Jakarta Pusat di hari yang sama. Dalam upaya menanggapi hal tersebut, melalui Mendagri Tjahjo Kumolo disebutkan bahwa Presiden Joko Widodo enggan langsung menerapkan Perppu Ormas tanpa persetujuan DPR. Sehingga pada tanggal 19 Juli 2017, Pemerintah secara resmi mencabut badan hukum Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).⁴⁵

C. Pengaruh Hizbut Tahrir di Indonesia

Pendirian ormas Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) dapat dikatakan merupakan suatu bentuk tindakan sosial yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Berkaitan dengan pernyataan tersebut, maka teori Max Weber sangat cocok. Menurut Weber, tindakan sosial sangat berhubungan dengan pertimbangan yang sadar dan pilihan

-

⁴⁵ *Ibid*.

bahwa tindakan itu dinyatakan.

Lebih jauh Weber menyatakan bahwa tindakan sosial adalah tindakan individu sepanjang tindakannya itu mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya dan diarahkan kepada tindakan orang lain. Tindakan sosial yang dimaksud Weber dapat berupa tindakan yang nyata-nyata diarahkan kepada orang lain. Juga dapat berupa tindakan yang bersifat "membatin" atau bersifat subyektif yang mungkin terjadi karena pengaruh positif dari situasi tertentu. 46

Inti dari teori Weber adalah bahwa tindakan sosial, apapun wujudnya hanya dapat dimengerti menurut arti subjektif dan pola-pola motivasional yang berkaitan dengan itu. Karena tidak selalu semua perilaku dapat dimengerti sebagai suatu manifestasi rasionalitas. Untuk mengetahui arti subjektif dan motivasi individu yang bertindak, yang diperlukan adalah kemampuan untuk berempati pada peranan orang lain.

Pendirian suatu ormas yang pasca reformasi beberapa tahun yang lalu keberadaanya semakin menjamur selain sebagai suatu tindakan sosial juga merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Hal ini benar-benar disadari oleh para pendiri bangsa jauh sebelum Reformasi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang termaktub dalam Pasal 28 UUD 1945. Dalam Pasal 28 tersebut

⁴⁶ Max Weber, *The Theory of social and Economic Organization*, edited by Talcot Parsons and translated by A.M.Handerson and Talcott Parsons (New York: Free Press, 1964), hlm. 88.

36

sangat jelas mengutamakan persoalan dalam berapresiasi untuk berorganisasi yang dilakukan oleh setiap elemen masyarakat. Komitmen tersebut tetap dijalankan oleh Pemerintah dengan bersyarat pada tujuan negara yang berkomitmen bahwa NKRI adalah Harga Mati. Itulah sebabnya mengapa persoalan pro dan kontra tentang ormasormas yang hadir di Indonesia harus disikapi dengan bijak dalam menjaga keutuhan NKRI. Salah satu syarat mutlak dari Ormas yang boleh hadir dan berkembang di Indonesia adalah tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang- Undang Dasar 1945. Termasuk Ormas yang berlandaskan agamapun tetap menjadi bagian yang diperhatikan negara sepanjang itu tidak bertentangan dengan Pancasila.

Memang saat ini Hizbut Tahrir telah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Namun pengaruh dari ajaran dan adanya Hizbut Tahrir di Indonesia tidak lenyap begitu saja dengan bubarnya organisasi mereka. Di antara pengaruh tersebut di antaranya adalah:

1. Pengaruh Positif

a. Dakwah Islam secara perorangan

Hizbut Tahrir Indonesia mengusung model pengkaderan yang tujuannya ialah untuk membangun partai dengan jalan pembinaan yang intensif melalui *halaqah-halaqah* dan penjelasan materi dakwah dalam buku-buku. Dalam hal ini HTI tidak melakukan indoktrinasi, dan dakwah yang dilakukan selalu dengan cara terbuka dan kritis. Semua sagmen kaum muslimin dianggap sebagai kader potensial HTI. Oleh karena itu, buletin al-Islam dapat diakses oleh semua orang dan diharapkan bahwa sebelum bergabung menjadi kader HTI, masyarakat dapat mempelajarinya terlebih

dahulu.

- b. Dakwah secara kolektif. Hal ini dilakukan dalam bentuk kegiatan yang terbuka untuk publik seperti seminar dan pengajian umum.
- c. Memberi pengetahuan tentang Islam kepada umat melalui penyebaran buletin bulanan atau mingguan sebagai upaya untuk menyikapi perkembangan sosial di tengah masyarakat.
- d. Pengungkapan rencana-rencana makar yang dilakukan oleh musuh Islam yang dalam pandangan HTI adalah kaum penjajah yang kafir.

Organisasi yang sifatnya internasional ini sangat menekankan pentingnya peran negara (dawlah) atau kekhalifahan sebagai sarana penerapan syariat Islam. Syariat dalam pandangan kelompok ini harus ditopang oleh kekuatan negara, sehingga kelompok ini termasuk pihak yang menganut paham integrasi antara agama dan negara. Meskipun umat Islam Indonesia merupakan mayoritas, ide penerapan syariat Islam tidak mudah diterima oleh sebagian mereka. Meskipun demikian, hal yang paling dominan dari sikap menolak ini adalah ketidaktahuan mereka tentang arti syariat Islam.

Kondisi inilah yang menjadikan seluruh aktifis HTI berkewajiban untuk menyadarkan umat Islam akan perlunya syariat Islam. Kondisi sosiologis inilah yang kemudian menjadi bahan pertimbangan HTI dalam penyusunan agendanya, yang meliputi tahap dakwah bagi berbagai kalangan melalui khutbah dan pengajian-pengajian, diskusi atau seminar, dialog dengan tokoh, bersilaturahmi dengan ulama, serta penyebaran buletin dan pemasangan spanduk-spanduk.

2. Pengaruh Negatif

Secara umum Hizbut Tahrir mengklaim sebagai partai politik,meskipun tidak secara formal terdaftar di Departemen Kehakimandan HAM untuk menjadi peserta pemilihan umum di Indonesia. HTI menerjemahkan partai politik dalam pengertian yang luas yaitu sebagai suatu organisasi yang aktivitasnya bertujuan mengoreksi kekuasaan dan membangunnya secara benar (haq). Sebagai partai politik, HTI memiliki tiga karakteristik, yaitu: pertama, Secara ideologis partai ini berdasarkan Islam yang digunakan sebagai cara pandang dalam melakukan penilaian terhadap berbagai hal. Kedua Ruang geraknya bersifat internasional, karena HTI adalah bagian dari Hizbut Tahrir Internasional yang mempunyai perwakilan di berbagai negara. Ketiga, Aktivitasnya bersifat ekstra parlementer, sifat ketiga ini yang membuat HTI tidak mendaftarkan diri sebagai peserta pemilu. Meskipun demikian, aktivitas HTI juga tidak seperti ormas lain yang melakukan aktivitas sosial dan pendidikan sebagaimanadilakukan ormas-ormas lain.

Sebagai partai politik, HTI harus memperjuangkan terbentuknya *Khalifah Islamiyah*, dan untuk menuju ke arah itu, menjalin kekuatan bersama umat Islam lain harus dilakukan dengan memperkuat *Ukhuwah Islamiyah*. Jika pembentukan khalifah akan memakan waktu panjang, maka yang bisa segera dicapai adalah pemberlakuan syariat Islam. Formalisasi syariat ini tidak akan menjadi potensi disintegrasi, karena Islam menjadi *rahmatan lil alamin, rahmat* untuk semua kelompok. Pembentukan khilafah menjadi keharusan didasarkan pada dua hal, *pertama*, *Khilafah Islamiyah*

adalah bentuk negara yang dicontohkan oleh Nabi dan dilanjutkan oleh sahabat. Kedua, Perlunya pemimpin yang dapat menyatukan semua kalangan Islam. Artinya dalam *khilafah* pemimpin itu harus mendunia atau tidak terbatas pada teritorial tertentu.

Pembentukan khilafah telah menjadi obsesi dari organisasi ini. Menurut HTI, konsep khilafah adalah suatu ajaran Islam prinsipil yang selama ini terabaikan, suatu keadaan yang menjadi sebab kemunduran umat Islam. Landasan kewajiban menegakkan khalifah ini adalah Qur'an, Sunnah Nabi dan *Ijma* sahabat. Meskipun secara teks tidak ada perintah mendirikan negara Islam, tetapi khilafah harus dipahami secara kontekstual. Untuk mencapai ini, HTI tidak masuk dalam politik lewat parlemen, melainkan lebih mengkonsentrasikan diri pada penyiapan kader dan pembinaan umat.

Selain itu, HTI juga aktif dalam pembentukan opini di tengah masyarakat tentang berbagai masalah kehidupan baik sosial, ekonomi, politik dan budaya dalam perspektif Islam. Strategi ini merupakan perjuangan politik yang tujuan akhirnya adalah untuk merajut kembali kehidupan Islam agar berlaku dalam masyarakat luas. Dengan demikian, fokus dari perjuangan politik mereka bukan mendapatkan kekuasaan pemilu yang dalam penilaiannya bersifat jangka pendek, tetapi penumbuhan kesadaran umat tentang kehidupan Islami. Pemilu dalam pandangan mereka dapat membuat kerugian umat jika partai Islam yang bertarung jumlahnya banyak karena hal itu akan mendorong terpecahnya suara umat.

Secara umum, perkembangan Hizbut Tahrir Indonesia telah berjalan sekitar 40 tahun lamanya. Dimulai dari tahun 1980 hingga tahun 2017 telah menjadi salah satu ormas yang adadi Indonesia, meskipun pada dasarnya orientasi HTI ini lebih pada pembentukan negara khilafah. Pada 19 Juli 2017 Hizbut Tahrir Indonesia telah resmi dibubarkan oleh pemerintah. Melalui Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Freddy Harris, pencabutan badan hukum organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) sebagai tindak lanjut dari peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang (Perpu) nomor 2 Tahun 2017. Pencabutan status badan hukum HTI berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-30.AH.01.08 tahun 2017 tentang pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor AHU-0028.60.10.2014 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan HTI.

Menurut Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, kegiatan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan pancasila dan UUD 1945, sebagaimana diatur dalam UU Ormas. Menurut Wiranto, terdapat tiga alasan pemerintah membubarkan HTI, *pertama*, Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. *Kedua*, Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republi Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ormas. *Ketiga*, Aktifitas yang dilakukan HTI

dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah mengkaji lebih dalam tentang pemikiran dan pergerakan sosial-politik Hizbut Tahrir di Indonesia, penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- Hizbut Tahrir Indonesia merupakan sebuah gerakan sosial politik keagamaan. Kondisi Indonesia yang bentuk pemerintahannya berupa demokrasi mebuat Hizbut Tahrir tidak menjadi partai politik yang ikut serta dalam pemilihan umum karena bertentangan dengan ideologi mereka yang menentang sistem demokrasi.
- 2. Hizbut Tahir Indonesia dalam hal strategi dan manajemennya telah memiliki organisasi yang telah terdaftar secara resmi di Departemen Dalam Negeri dan memiliki tahapan dan strategi dakwah yang terstruktur. Mulai dari tahap pengkaderan, pembinanaan, interaksi dan penerimaan kekuasaan pemerintah.
- 3. Sejak kegagalan percobaan pengambil alihan kekuasaan di beberapa negera Timur Tengah seperti Sudan, Tunisia, Aljazair, Mesir dan lain sebagainya, Hizbut Tahrir mengubah strategi dakwahnya lebih condong ke arah mengajukan gagasan dan ideologi pemikiran mereka dan membina masyarakat agar menerapkan ajaran agama Islam serta tetap memperjuangkan tegaknya Khilafah Islamiyah.
- 4. Hizbut Tahrir Indonesia terpaksa harus dibubarkan sejak tanggal 19 Juli

- 2017 oleh Pemerintah Indonesia karena dianggap sudah menyimpang dan berindikasi kuat melakukan tindakan yang melawan dan bertentangan dengan asas dan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara.
- 5. Pengaruh positif Hizbut Tahrir di Indonesia adalah Hizbut Tahrir Indonesia mengusung model pengkaderan yang tujuannya ialah untuk membangun partai dengan jalan pembinaan yang intensif melalui *halaqah- halaqah* dan penjelasan materi dakwah dalam buku-buku. Dakwah secara kolektif. Memberi pengetahuan tentang Islam kepada umat melalui penyebaran buletin bulanan atau mingguan sebagai upaya untuk menyikapi perkembangan sosial di tengah masyarakat. Pengungkapan rencana-rencana makar yang dilakukan oleh musuh Islam yang dalam pandangan HTI adalah kaum penjajah yang kafir.
- 6. Pengaruh negatifnya adalah banyak anggota Hizbut Tahrir Indonesia yang jumud dan terlalu terpaku dengan apa yang menjadi cita-cita mereka, yakni pendirian Khilafah Islamiyah dan menjadi tidak menerima dan ataupun menentang serta mengecam bentuk negara yang tidak sepaham dengan meraka. Juga sebagai ormas berbadan hukum, HTI menurut Pemerintah Indonesia tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunanguna mencapai tujuan nasional. *Kedua*, Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republi Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, Aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

B. SARAN

Setelah mempelajari dan mengkaji pemikiran dan pergerakan sosial-politik Hizbut Tahrir di Indonesia, maka penulis memberikan saran kepada para pengkritik Hizbut Tahrir Indonesia agar jangan termakan isu dan persepsi yang cenderung negative serta menyesatkan sebelum mempelajari lebih lanjut tentang suatu organisasi dan/atau ideologi yang berkembang di Indonesia.

Hizbut Tahrir Indonesia merupakan sebuah ormas dengan gerakan sosial-politik yang ingin mewujudkan cita-cita mulai penegakan khilafah Islamiyyah dan dengan membina masyarakat agar lebih memperhatikan dan menghidupkan ajaran agama Islam. Hizbut Tahrir Indonesia merupakan gerakan yang dinamis mengikuti alur perkembangan zaman. Melalui organisasi inilah banyak muncul diskursus, dialog, interaksi tentang isu-isu dan pemikiran-pemikiran yang berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Kurniawan. (2003). Gerakan Politik Islam ekstraparlementer: Studi Kasus Hizbut Tahrir Indonesia. Depok: Tesis S2 Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia.
 - al-Nabhani, Taqiyuddin. al-Tafkir (1953) ttp.: Hizb Al-tahrir.
- Ali Jabir, Husain bin Muhammad. (2009). *Menuju Jamaatul Muslimin: Telaah Sistem Jamaah dalam Gerakan Islam*. Terj. Aunur Rafiq. Jakarta: Rabbani Press.
- Azman. Jurnal Ad-Daulah Vol 7 No. 1 Juni 2018. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Byrnes, F. Robert. (1992) *Perubahan dalam Sistem Politik Soviet, dalam Roy C. Macridis, Perbandingan Politik; Catatan dan Bacaan*. Jakarta: Airlangga.
- Fakih, Mansour. (1996). *Masyarakat Sipil untuk Transformasi Sosial: Pergolakan Ideologi LSM Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mubarak,. M. Zaki. (2008). Geneologin Islam Radikal di Indonesia: Gerakan, Pemikiran dan Prospek Demokrasi. Jakarta: LPS3S.
- Mufid, Ahmad Syafi'i (2011). *Perkembangan Paham Keagamaan Transasnsional di Indonesia*. Jakarta: Litbang dan Diklat Kemenag RI.
- Mulyaji, Mardiansyah. (2014). *Taqiyuddin an-Nabhani 1953-1977 (Suatu Tinjauan Historis tentang Perjuangan Hizbut Tahrir di Palestina*). Skripsi S1 Fakultas Adab Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.
- Qomar, Mujamil. (2012). Fajar Baru Islam Indonesia? Bandung: Penerbit Mizan.
- Samarah, Ihsan. (2002). *Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani*. Bogor: Al-Izzah Press).
- Samarah, Ihsan. (2003) Syaikh Taqiyuddin an-Nabhani Meneropong Perjalanan Spiritual Dakwahnya. Bogor: Al-Azhar Press.
- Sihbudi., M. Riza., Hadi, Ahmad. (1992) *Palestina: Solidaritas Islam dan Tata Politik Dunia Baru*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
 - Sunarto, Kamanto., (2000) Pengantar Sosiologi Depok: UI Lembaga Penerbit

Fakultas Ekonomi, Edisi II.

Sztompka, Piotr. (2014) *Sosiologi Perubahan Sosial*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Tahrir, Hizbut. (2000). *Titik Tolak Perjalanan Dakwah Hizbut Tahrir*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Tahrir, Hizbut. (2000) *Mengenal Hizbut Tahrir dan Strategi Dakwah Hizbut Tahrir*. Bogor: Pustaka Thariqul Izzah.

Turmudzi, Endang., Sihabudin, Riza. (2006). *Islam dan Radikalisme di Indonesia*. Jakarta: LIPI Press.

Yusanto, Ismail. (2000). *Berdirinya Khilafah Islamiyah Tidak Utopis*. Bandung: Majalah Madina.

Za'rur, Abu. (2014). Seputar Gerakan Islam. Bogor: Al-Azhar Press.

Zulfadli. (2010). *Infiltrasi Gerakan Hizbut Tahrir di Yogyakarta*. Yogyakarta: Tesis Program Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga.

https://id.wikipedia.org/wiki/Pembubaran_Hizbut_Tahrir_Indonesia, diakses pada tanggal 22 November 2021

https://www.globalmuslim.web.id/2008/08/hizbut-tahrir-menjawab-tuduhan-miring.html, dikases pada tanggal 20 November 2021.

Hasanah, Fitrina. (2016) *Peranan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Sebagai Organisasi Islam Non Partisan Dalam Perspektif Khilafah*). Jakarta: Skripsi Program Studi Ilmu Politik Universitas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah.

Max Weber, (1964). *The Theory of social and Economic Organization*, edited by Talcot Parsons and translatedby A.M.Handerson and Talcott Parsons, New York: Free Press.

Nurhidayat. (2014) *Hizbut Tahrir Di Makassar*, 1994-2012. Makassar: Universitas Negeri Makassar